



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, DAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN
PERTOLONGAN/BASARNAS)**

Tahun Sidang	: 2022 – 2023
Masa Sidang	: III
Rapat	: Ke – 9
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Hari/Tanggal	: Selasa, 7 Februari 2023
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.10 WIB s.d 13.40 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI
Acara	: 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022; 2. Membahas Program Kerja Tahun 2023; 3. dan Lain-lain
Ketua Rapat	: Muhammad Iqbal, S.E.,M.COM
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, SH
Hadir Anggota	: ... Orang dari 57 orang Anggota Komisi V DPR RI secara Fisik dan Virtual
Hadir Mitra	: Sekjen, Irjen, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.10 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Pejabat Eselon I Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi pada hari ini adalah Membahas evaluasi Pelaksanaan APBN TA 2022, membahas Program Kerja Tahun 2023 dan Lain-lain.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Pejabat Eselon I Kementerian Desa PDT dan Transmigrasi untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN.../Hal.2

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Terkait dengan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Jenderal; Inspektorat Jenderal; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi dalam APBN TA 2022:
 - a. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi atas capaian realisasi dalam TA 2022 sebagai berikut:

No	Unit Organisasi Eselon I	Realisasi Keuangan TA 2022	Realisasi Fisik TA 2022
1.	Sekretariat Jenderal	99,61%	100%
2.	Inspektorat Jenderal	97,98%	99,75%
3.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	99,05%	100%
4.	Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi	95,14%	96,70%

- b. Terhadap program/kegiatan di TA 2022 yang tidak terealisasi, Komisi V DPR RI meminta Sekretariat Jenderal; Inspektorat Jenderal; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi agar menyelesaikan permasalahan dan kendala teknis pada pelaksanaan program/kegiatan TA 2022, sehingga tidak terulang kembali pada Tahun Anggaran berikutnya.
2. Komisi V DPR RI meminta Sekretariat Jenderal; Inspektorat Jenderal; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi agar meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan saran, masukan serta usulan Komisi V DPR RI.

3. Komisi V DPR RI meminta Sekretariat Jenderal; Inspektorat Jenderal; Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi; dan Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi untuk:
- menyampaikan materi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara lebih terperinci dan transparan untuk setiap program/kegiatan dan besaran anggarannya, disertai dengan *roadmap* dan capaian sampai dengan tahun yang berjalan;
 - meningkatkan fungsi pengendalian intern untuk meminimalisir temuan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
 - melakukan evaluasi terhadap proses rekrutmen dan kinerja Tenaga Pendamping Profesional dan melaporkan hasilnya kepada Komisi V DPR RI;
 - memprioritaskan masyarakat lokal desa dalam rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional;
 - mengoptimalkan kinerja Bumdes melalui pelatihan peningkatan kapasitas; dan
 - meningkatkan sistem informasi desa yang akurat dan terintegrasi.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.40 WIB.

Jakarta, 7 Februari 2023

KETUA RAPAT


MUHAMMAD IQBAL

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI,


TAUFIK MADJID

Pit. INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI,


EKO SRI HARYANTO

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SDM DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DDTT
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRASMIGRASI,


LUTHFIYAH NURLAELA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN INFORMASI
DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA PDT DAN TRANSMIGRASI,


IVANOVICH AGUSTA